

STRATEGI PENGELOLAAN CSR-MULTINASIONAL SEBAGAI MODEL CSR BELA NEGARA; STUDI KASUS PT FREEPORT DAN PT CHEVRON

Oleh :

Mhd Halkis

Dosen Diplomasia Pertahanan Universitas Pertahanan dan Hukum Dagang Internasional
Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma
Email : (halkis@idu.ac.id)

Abstract :

This study aims to develop the model of CSR Bela Negara with an assumption that the ethical value of a company will seek to defend itself for the sake of the sustainability of a business. Starting from the Three-Dimensional Performance Model of Corporate Performance by Archie B. Carroll on CSR's Relationship with Corporate Performance to understand the phenomenon of two different companies, the problematic company (PT.Freeport Indonesia is changing from Contract of Work to IUPK) and company which supports both central and regional regulation (PT.Chevron, fixed with Contract of Work status). There are three elements of concern; categories of understanding of social responsibility, involvement of social problems, and philosophy of accountability. The results of research indicate that awareness of corporate discretion that is able to respond to the needs of the environment, especially the political condition of the state seen a multinational company persist. which persist by emphasizing on CSR-Discretion. For that Conceptual Model of Three Dimensional Companies Archie B Carrol can be developed as a Model of CSR Bela Negara.

Keywords: *Bussines Ethics, Corporate Social Responsibility Bela Negara (CSR-BN), Citizenship Corporate (CC), and Multinational Corporate*

I. PENDAHULUAN

Etika Bisnis yang berpusat pada “materialis-hedonisme” telah memberi prioritas pertama pada kekayaan dan prioritas sekunder bagi umat manusia. Adam Smith berasumsi bahwa umat manusia dapat diletakan sebagai kekayaan tapi kekayaan tidak bisa disetarakan dengan umat manusia. Kekayaan ditransfer dalam bentuk uang ataupun perak, dengan demikian uang dan perak akan menguasai apa yang kita mau.¹ Pada

sisi lain Alfred Marshall menjelaskan ekonomi adalah studi tentang umat manusia dalam kehidupan secara sengaja, bagaimana seseorang mendapatkan penghasilan dan bagaimana dia menggunakannya². Dengan demikian studi tentang kekayaan dan hubungannya dengan manusia masuk dalam etika, atau etika bisnis. Cara pandang manusia yang dinamis terhadap kekayaan lebih utama dan di sisi lain yang paling

¹Smith, Adam, *An Inquiry Into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*, The Wealth of Nations: Book 1 ElecBook Classics ,p.558

²Marshall, Alfred (1890) *The Principles of Economics*, (First ed.). London: Macmillan. Retrieved 2012,p.10.

penting adalah harkat umat manusia lebih utama menjadi pokok persoalan pada awalnya.

Etika bisnis dalam kerangka konstitusi Indonesia bertitik tolak dari Pasal 33 UUD 1945 bahwa kekayaan alam dikuasi oleh negara dan dipergunakan untuk kepentingan rakyat. Pengelolaan kekayaan alam dibawah tanah yaitu tambang bernilai strategis namun memerlukan teknologi tinggi dan SDM yang profesional. Teknologi tinggi tersebut hanya dikuasi oleh perusahaan besar atau perusahaan negara. UU No. 40 Th 2007 tentang Perseroan Terbatas. Undang-undang ini telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Pada PP ini menjelaskan tentang kepatutan dan kewajiban;

“kepatutan dan kewajiban” adalah kebijakan Perseroan, yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Perseroan, dan potensi risiko yang mengakibatkan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang harus ditanggung oleh Perseroan sesuai dengan kegiatan usahanya yang tidak mengurangi kewajiban sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan”.

Studi yang tepat untuk memahami batasan konsep kepatutan dan kewajaran perusahaan adalah Etika Bisnis. Inti Studi Etika bisnis adalah Studi tentang benar dan salah dalam berbisnis dan berubah seiring waktu dan budaya. Secara umum semua badan usaha yang menggunakan badan hukum Perseroan terbatas wajib melaksanakan CSR ini. Salah satu

wujud etika bisnis dan paling menonjol adalah program *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai implementasi perilaku etis yang belum tentu menambah kesuksesan bagi sebuah perusahaan.

Fenomena CSR mengemuka di akhir-akhir ini, karena meningkatnya kesadaran masyarakat akan dampaknya. Untuk mencari dan membela nilai-nilai keadilan dan sisi lain perusahaan penting untuk memberikan citra yang baik kepada publik. Ruang lingkup tuntutan oleh masyarakat tentang CSR bukan hanya masalah perusahaan besar tapi perusahaan juga lokal. Karakter perusahaan tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan dapat digambarkan;

Q1 Lingkup penguasaan masyarakat lokal, usaha resiko lingkungan rendah. Misalnya Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Rumah Makan, dll.	Q2 Lingkup penguasaan multinasional, resiko rendah, misalnya perdagangan ritel Carefour, Mall, Mc Donal dll.
Q3 Lingkup Lokal, Resiko Tinggi. Pertambangan batu bara, perkebunan yang diusahakan oleh masyarakat lokal.	Q4 Lingkup Multinasional, resiko lingkungan tinggi. Pertambangan Mineral dikuasi oleh Perusahaan Multinasional, seperti Freeport, Chevron, Exxon, dll.

Gambar 1; Quadran Karakter CSR

Secara khusus CSR perusahaan pertambangan diatur lebih lanjut pasal 95 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang dilakukan dalam bentuk *community development* seperti pemberian bantuan pendidikan bagi

masyarakat sekitar wilayah tambang, pemberdayaan para guru, pendirian Puskesmas, pengarahan tentang cara bertani yang baik. Kemudian pasal 15 dan pasal 34 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dengan demikian kewajiban atas CSR merupakan kewajiban mulai dari konstitusi UUD 1945 sampai undang-undang yang mendukungnya, namun penelitian ini terbatas hanya pada perusahaan tambang multinasional saja.

1. Tinjauan Teoritis

Grand theory penelitian ini bertitik tolak pada etika bisnis diwujudkan dalam CSR, artinya “CSR sebuah perusahaan yang baik muncul dari Etika Bisnis yang baik”. Karena keunikan penelitian menjelaskan pola CSR pada perusahaan pertambangan multinasional, maka penelitian ini akan menunjukkan CSR perusahaan tambang multinasional beda dengan perusahaan BUMN, perusahaan nasional, lokal dll. Sekalipun perdebatan akan muncul tentang *legal standing* siapa yang menetapkan peraturan tentang CSR, tapi peneliti akan menjelaskan norma-norma yang keterkaitan antara lembaga dan implikasi-implikasinya jika diatur dengan memperhatikan berbagai kebutuhan *stakeholder*. Pergeseran kekuasaan negara dengan dunia bisnis di era globalisasi semakin terasa, bisnis merujuk pada pasar sementara negara dibebankan dengan berbagai kewajiban. Untuk itu persoalan tanggungjawab perusahaan tidak hanya sebatas bantuan lepas, tapi dituntut tanggungjawab menyangkut tenaga

kerja, melindungi lingkungan, perubahan iklim dan korupsi sehingga dikaitkan dengan konsep “*Corporate Citizenship*” dan “Pemerintahan Baru”. *Corporate Citizenship* adalah tentang: peran perusahaan sebagai aktor politik dalam proses pengaturan aturan sosial. Menurut John Boatright secara filosofis sekarang terjadi pergeseran dari struktur berdasarkan kepemilikan modal kepada jaringan modal sumberdaya manusia.³

Menurut Archie Carroll jenis tanggung jawab perusahaan secara umum ada empat level;

- a. Tanggungjawab Ekonomi;
- b. Tanggungjawab Hukum;
- c. Tanggungjawab Etis;
- d. Tanggungjawab *Corporate Citizenship (CC)*.

Penekananan penelitian pada CSR pada level tertinggi yang disebut dengan *Corporate Citizenship*. Keunikan perusahaan multinasional bukan hanya mengikuti norma-norma negara asal mereka tapi juga negara dan lingkungan masyarakat yang ditempati. Sebagai sebuah perusahaan dalam suatu Negara merupakan entitas yang tunduk akan hukum di Negara tersebut. Kemudian terkait dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara pasal 9 ayat (1) menyebutkan setiap Warga

³Pies, Ingo., Peter Koslowski, (ed.), (2011) *Corporate Citizenship and New Governance The Political Role of Corporations, Ethical Economy. Studies in Economic Ethics and Philosophy*, Springer Dordrecht Heidelberg London New York. pp.1-5

Negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan negara. Untuk itu Perusahaan Multinasional selaku subjek merupakan warganegara sehingga penting mencari model *corporate citizenship* yang tepat.

Penjelasan Carroll tentang *Corporate Citizenship* tidak mengatur keterkaitannya dengan bela negara. *Corporate Citizenship* yang dimaksudkan Carroll berproses mulai dari tanggungjawab sosial perusahaan dalam bentuk untung rugi dan aturan mana yang mewajibkan, *Corporate Citizenship* bersifat *discretionary*. Kemudian lebih lanjut kesasaran sosial yang terlihat dalam aktivitas dan aksi perusahaan dan ketiga adalah kinerja perusahaan yang menekankan hasil dan dampak dari suatu kegiatan.⁴

Inti masalah yang dibahas makalah ini terbatas pada Strategi Pengelolaan *Corporate Social Responsibility (CSR)* Perusahaan Multinasional. Pertanyaannya mengapa Perusahaan Multinasional melakukan *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Pertanyaan ini dalam konteks mengevaluasi kebijakan Perusahaan multinasional sebagai entitas kewarganegaraan. Data awal menunjukkan, bahwa *Corporate Social Responsibility (CSR)* dilakukan oleh perusahaan multi nasional dalam dalam rangka menjamin

keberlanjutan perkembangan perusahaan (*sustainable development*). Jika demikian, maka perusahaan multinasional hanya untuk pkenetingan sendiri, sehingga hak dan kewajiban membela belum menjadi perhatian. Untuk itu persolan utama adalah membangun model *Corporate Social Responsibility (CSR)* Bela Negara. Akan tetapi *Corporate Social Responsibility (CSR)* bukan sesuatu yang baru, dan pendekatan kewargaraan juga telah dilakukan untuk itu, lebih tepat Pengembangan Model *Corporate Citizenship (CC)*. Dengan demikian penelitian ini dapat dirumuskan; Menganalisis strategi pengelolaan *Corporate Social Responsibility (CSR)* Perusahaan Pertambangan multinasional di Indonesia dan Mengembangkan Model *Corporate Social Responsibility (CSR)* Bela Negara untuk perusahaan tambangan multinasional, baik di wilayah krisis maupun aman.

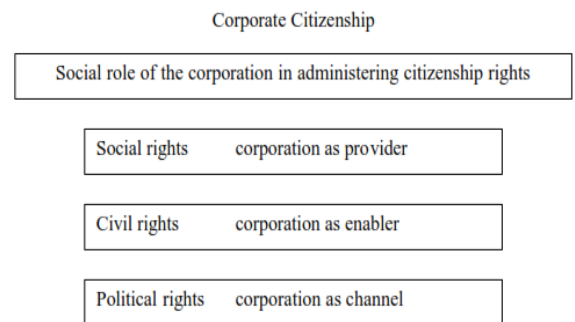
Keunikan penelitian diharapkan mampu merumuskan model CSR Bela Negara pada perusahaan pertambangan multinasional. Tersembunyi dalam penelitian bahwa CSR tersebut akan berbeda dengan perusahaan lokal dan juga perusahaan yang bergerak dibidang bukan pertambangan. Perbedaan itu dapat dipahami resiko perusahaan tambang terhadap lingkungan sangat tinggi, untuk itu spesifikasi temuan penelitian diharapkan terletak dari CSR Bela Negara pada perusahaan pertambang multinasional. Penelitian ini disebut juga pengembangan model karena

⁴Carroll, Archie B. Ann K. Buchholtz (2008) *Business & Society Ethics and Stakeholder Management*, Seventh Edition South-Western Cengage Learning 5191 Natorp Boulevard Mason, OH 45040 USA, p.36

informasi dari beberapa sumber CSR pada perusahaan multinasional sudah ada namun belum optimal, dengan penambahan istilah Bela Negara, maka lebih dekat dengan perumusan, artinya temuan hal baru tentang : CSR Bela Negara. Dengan demikian penelitian ini akan bermanfaat dalam rangka Pendidikan Bela Negara sekaligus penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan di Perusahaan Tambang Multinasional.

Dirk Matten & Andrew Crane dalam sebuah tulisannya dengan judul *Corporate Citizenship: Towards an extended theoretical conceptualization* secara khusus mencari definisi yang tepat dengan Corporate Citizenship. Korporasi dipandang sebagai warga negara sendiri (sebagai individu), dan terhadap pengakuan bahwa korporasi mengelola aspek - aspek tertentu kewarganegaraan untuk individu tersebut. Perusahaan tidak hanya sebagai perusahaan yang mengelola hak-hak kewarganegaraan ini, tapi mereka telah mengambil alih cukup banyak tanggung jawab untuk administrasi pemerintahan. Dengan administrasi hak berarti sejumlah peran dan tindakan yang berbeda. Berkenaan dengan hak sosial, korporasi pada dasarnya memasok atau tidak memasok individu dengan pelayanan sosial dan karenanya mengelola hak dengan mengambil peran yang memberi. Dalam Kasus hak-hak sipil, perusahaan baik menggairahkan atau membatasi

hak sipil warga negara, dan karenanya dapat dipandang sebagai efek administrasi melalui peran yang memungkinkan. Akhirnya, di ranah hak politik, korporasi pada dasarnya adalah sebuah tambahan saluran untuk pelaksanaan hak politik individu - maka korporasi mengasumsikan administrasi melalui peran penyaluran. Keterkaitan *Corporate Citizenship* dengan berbagai peran pemerintahan dapat digambarkan;



Gambar 3;
Konsep Teoritis tentang Corporate Citizenship oleh Dirk Matten & Andrew Crane⁵

Keterkaitan CSR dengan Bela Negara merupakan inovasi dengan kondisi ke-Indonesiaa. Undang-undang Pertahan Negara menjadi nilai tambah dari penelitian ini. Karena masalah pertambangan dibawah kontrol Kementerian Energi Sumberdaya Mineral (ESDM), untuk penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi kementerian ESDM tersebut

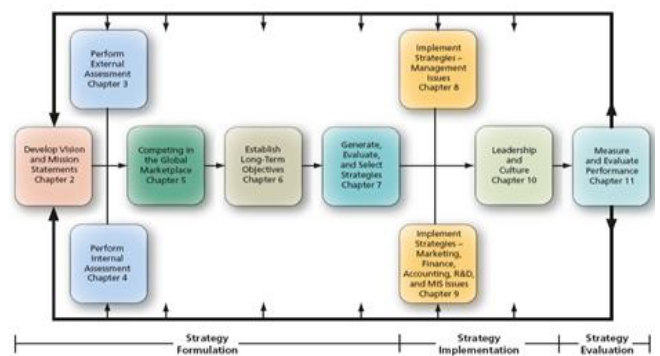
⁵Matten, Dirk & Andrew Crane dalam *Corporate Citizenship: Towards an extended theoretical conceptualization*, International Centre for Corporate Social Responsibility Nottingham University Business School Nottingham University Jubilee Campus Wollaton Road Nottingham, pp.13-14

tentang bagaimana menata CSR yang tepat pada perusahaan pertambangan multinasional dan hal-hal yang dapat disumbangkan oleh Kementerian Pertahanan, Kementerian Dalam Negeri terkait dengan masyarakat atau pemerintah daerah dan lain-lain.

Kemudian untuk memahami fenomena ini penting teori manajemen strategik. Secara sederhana manajemen strategik adalah keterampilan (seni), teknik, dan ilmu dalam merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi serta mengawasi berbagai keputusan-keputusan fungsional sebuah organisasi (perusahaan bisnis ataupun non bisnis) yang selalu terpengaruhi oleh lingkungan eksternal dan internal dengan kondisi yang selalu berubah sehingga bisa memberi kemampuan pada perusahaan dalam pencapaian sasaran atau tujuan yang sudah ditetapkan. Berdasarkan dari Definisi Manajemen Strategi diatas, proses dalam Manajemen Strategis meliputi beberapa tahapan: Pengamatan Lingkungan, Perumusan Strategi, Impelmentasi Strategi, dan Evaluasi Strategi. Didalam perusahaan besar, proses perumusan (formulasi) strategi, implementasi, pengevaluasian dan pengawsan strategi ada tiga tingkatan hierarki, tingkatan corporate, tingkat divisi serta tingkatan fungsional.

Kemudian perlu juga memahami istilah multinasional hampir sama dengan; bisnis global, kapitalisme global, atau dalam bahas agak

estrim bisa juga neokolonial. Ada beberapa fenomena perusahaan di era global; Pertama, Perusahaan terlibat dalam berbagai bentuk lobi, baik dari pemerintah atau pemerintah asosiasi bisnis atau media. Kedua, perusahaan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan oleh masyarakat dan mobilisasi. Kewargaraan sebagai pengembangan ekonomi lokal, pendidikan atau masalah lingkungan. Ketiga, Perusahaan dapat menyelaraskan kegiatan mereka dengan agenda sosial yang lebih luas.



Gambar (4)

Konsep Strategi Pengelolaan CSR diambil dari; David, Fred R. "How Companies Define Their Mission," Long Range Planning 22, no 3 (June 1988): p.40

Drucker, Peter F. dalam bukunya *Management Challenges for the 21st Century* menjelaskan perusahaan multinasional, atau perusahaan apapun pada prinsipnya sama saja, perbesarannya terletak pada pelaksanaannya. Perbedaan dalam manajemen antara organisasi terlihat dalam misi dan merumuskan strategi, dan strategi mendefinisikan struktur. Sembilan puluh persen atau lebih dari apa

masing-masing organisasi sama sama, dan perbedaannya terhadap 10 persen yang harus dipasang misi spesifik organisasi, budaya spesifiknya, spesifikasi sejarahnya dan kosa kata yang spesifik⁶

Studi Ekonomi di barat bertitik tolak pada studi Etika. Carroll menjelaskan masalah Moral dan Etika Bisnis dalam bukunya “*Business & Society Ethics and Stakeholder Management*” mengawali dengan studi Clifford Geertz di Bali. Dalam hal ini perlu memahami penggunaan imajinasi moral dalam pengelolaan perusahaan. Perjalanan sejarah filantropis dalam peradaban apapun dapat dipikirkan sebagai "sejarah sosial imajinasi moral." Memang dalam perspektif ekonomi sehat atau tidak sehat sebuah perusahaan dapat dilihat dari nilai fundamentalnya, akan tetapi dari perspektif manajemen lebih luas perusahaan dapat dikatakan baik atau tidak perlu dilihat dari dimensi sosial. Carroll menjelaskan sebuah karakteristik organisasi yang sehat dalam manajemen.⁷

2. Metodologi

Rangkaian penelitian dengan menggunakan pendekatan Metode Fenomenologis. Bertitik tolak pada tujuan penelitian yaitu; membangun model CSR Bela Negara, dalam hal ini dengan melakukan modifikasi terhadap

konsep *Corporate Citizenship* (CC). Dengan suatu asumsi bahwa Perusahaan Multinasional sebagai sebuah entitas memiliki visi dan misi dalam pengembangan peusahaan bersifat etis (Etika Bisnis) namun lingkungan selalu berubah sehingga penting dievaluasi dan dikonstruksi ulang agar sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan baik situasi masyarakat, lingkungan, kondisi pasar, regulasi pemerintahan dan stakeholder lainnya. Untuk itu langkah pertama merumuskan kebutuhan (*requirements*) berbagai pihak. Kemudian melakukan desain, uji coba dan langkah praktis diterimanya desain tersebut oleh para pihak. Mengingat keterbatasan waktu dan lainnya, fokus penelitian adalah merumuskan model dengan cara menggali pendapat para pihak dan dikonstruksi secara matematis sehingga dapat dioperasionalkan lebih lanjut. Sekalipun fokus pada pemodelan, langkah – langkah menuju proyeksi kegiatan kedepan menjadi bagian tidak terpisahkan dari kegiatan penelitian ini.

Untuk memudahkan memahami desain penelitian ini dalam menggunakan “Model V”. Pada prinsipnya cara model “V” melakukan proses verifikasi dan validasi. Dengan langkah-langkah yang dilakuakn model V diharapkan dapat memenehui syarat koherensi dan konsistensi penelitian ini. Responden dipilih berdasarkan keterkaitannya dengan tanggungjawab dan kepentingan dengan CSR Bela Negara terutama Manajemen PT Freeford

⁶Drucker, Peter F. (1999) *Management Challenges for the 21st Century*, Claremont, California New Year's Day 1999, Perfectbound, p8

⁷Carroll, Archie B. Ann K. Buchholtz (2008) *Business & Society Ethics and Stakeholder Management*, Seventh Edition South-Western Cengage Learning 5191 Natorp Boulevard Mason, OH 45040 USA, p. 267

Indoensia dan Manajemen PT. Cevron Indoensia.

Objek penelitian adalah regulasi, pengaturan tentang CSR Perusahaan Multinasional, dalam hal ini adalah PT Freepor dan Chevron. Visi, Misi, Strategi, Struktur Organsiasi, Program Kerja dapat menggambarkan Strategi dan Pola CSR yang ada. Dari data yang ada dikonfirmasi melalui wawancara kepada pihak-pihak, terutama subjek-subjek terkait. Data terkoumpul kemudian diadakan pengamatan di lapangan, apa benar dialkuak atau sejauh mana yang direncanakan terlaksana serta melihat potensi yang dapat dikembangkan. Data terkumpul kemudian diklasifikasi, dianalisis, direduksi dan dikonstruksi menjadi CSR Bela Negara, sehingga out put Studi ini secara praktis Naskah Akademik.

3. Hasil

PT. Freeport Indonesia dalam melaksanakan tanggungjawab sosial lebih menekankan pada aspek ekonomi yang bersifat kuantitatif. Bahkan beberapa kesempatan penjelasan pembagian untuk negara merupakan sumbangan dari perusahaan. Kontribusi perusahaan dari tahun 1992 s/d 2014 sejumlah US\$ 15,8 miliar penerimaan negara secara langsung, dan 29,5 miliar sebagai kontribusi keuntungan bersifat tidak langsung. Bagi PT Freeport Indonesia masalah nasionalisme dan patriotisme merupakan urusan politik negara. Pemisahan tanggngjawab negara dengan perusahaan sangat terasa pada

perusahaan multinasional yang berorientasi tanggungjawab sosial pada tingkat ekonomi. Dimensi lain dibalik gejolak Papua masih tersembunyi gerakan laten yang bernilai sangat politis baik dalam negeri berupa pemberontakan bersenjata dilakukan Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan gerakan diplomatik diluar negeri dengan terbuka seperti yang dilakukan Benny Wenda, Filep Karma dan lain-lain membuat perhatian dunia pada Indonesia. Dengan keadaan demikian membuat kondisi di Papua tidak kondusif menjadi pembicaraan kalangan HAM dunia dan operasi militer dilakukan sepanjang tahun.

Lain dengan PT.Cevron yang menilai tanggungjawab sosial sebagai diskresi perusahaan, sedangkan tanggungjawab perusahaan ke negara telah diatur dengan ketentuan yang mengikat. Perusahaan telah banyak melakukan bantuan Pendidikan diantara Politeknik Caltex Riau (PCR) yang dinilai Dikti tahun 2015 sebagai politeknik swasta terbaik se Indonesia. Saat ini PRC bersifat mandiri dan tidak terkait dengan manajemen PT Cevron Indonesia. Untuk itu kinerja sosial perusahaan multinasional PT Cevron Indonesia dalam kategori tanggungjawab sosial pada tingkat *Corporate Citizenship* (CC) dapat dikembangkan menjadi *Corporate Social Responsibility* Bela Negara (CSR-Bela Negara). Pandangan negatif terhadap PT.Cevron Indonesia atau dulu disebut Caltex tidak terlalu mengemukan, sekalipun sampai saat ini dalam

status Kontrak Karya tidak ada gerakan yang mengancam secara signifikan. Sekalipun ada isu-isu Riau Merdeka seperti disampaikan Tabrani Rab, Al Azhar dan lainnya tapi tidak mengemuka apalagi setelah Tabrani Rab sibuk dengan Universitas miliknya dan Al Azhar diangkat menjadi Lembaga Adat Melayu Riau.

Kalau dikaitkan tanggungjawab berbagai pihak dalam pelaksanaan CSR, maka kinerja tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility / CSR*) semakin penting dipahami bagi pelaku dunia usaha multinasional. Komunikasi CSR adalah topik diskusi yang jarang dalam konstruksi bidang penelitian. Model kinerja CSR perusahaan tambang dimaksudkan untuk bermanfaat bagi akademisi dan manajer. Bagi para akademisi memberikan bantuan konseptual, dalam hal ini adalah dalam konteks Bela Negara. Manajer dapat memahami perbedaan antara konsep CSR sebagai tanggung jawab sekaligus daya tanggap yang memuat isu sosial / pemangku kepentingan dengan konsep ekonomi. Model Kinerja CSR yang dirumuskan Carroll membantu untuk mensistematisasi konsep Bela Negara. Referensi Bela Negara peneliti menggunakan istilah *Nation Security Mission* (NSM), sehingga persoalan yang menjadi fokus pada; *Social Responsibility*, *Social Issues* dan *Nation Security Mission* atau Bela Negara.

Menurut Carroll *Corporate Citizenship* (CC) adalah tahap filantropis dalam CSR terkait

langsung dengan nilai-nilai kewargaraan. Untuk itu peneliti menempatkan elemen Bela Negara sebagai landasan filosofis sebuah perusahaan termasuk perusahaan multinasional. Untuk memahami filantropi perlu dipahami beberapa hal;

- a. Setiap perusahaan atau organisasi harus mampu beradaptasi dengan lingkungannya.
- b. Jika tidak mampu melakukan perubahan dengan lingkungan atau perubahannya yang lambat, maka perusahaan akan berantakan dan tidak produktif.
- c. Pemimpin perusahaan berkesempatan untuk melakukan perubahan dan jika tidak bisa berakibat fatal bagi perusahaan dan orang lain dan negara.
- d. Kumpulan organisasi yang beragam sangat penting bagi perkembangan negara, masyarakat, individu dan seluruh lingkungan secara sehat.⁸

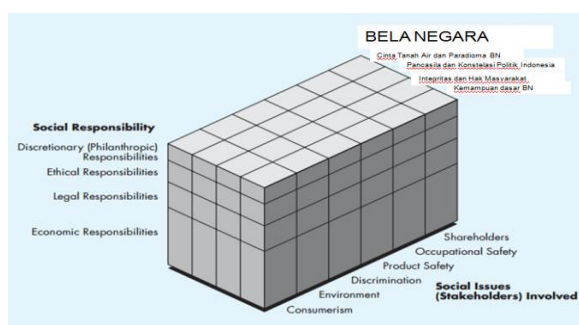
Dengan demikian dapat diintegrasikan Konsep Bela Negara yang telah berkembang Departemen Pertahanan dengan Nilai / Value dalam *The National Security Agency*.⁹ Untuk itu *Philosophi (Mode) of Social Responsiveness* oleh Carroll dimodifikasi menjadi Filsafat Bela Negara (BN) sehingga dimensi filosofis CSR Bela Negara dapat dirumuskan ;

⁸Bernholz, Lucy, (2004) *Creating Philanthropic Capital Markets The Deliberate Evolution*, p. John Wiley & Sons, Inc. 32

⁹<https://www.nsa.gov/about/mission-strategy/>

- a. Cinta Tanah Air/Kejujuran – Paradigma Berpikir dan Bela Negara.¹⁰
- b. Kesadaran dan Keyakinan terhadap Pancasila, dimodifikasi menjadi Pancasila sebagai Konstelasi Politik Indonesia.
- c. Integritas – Kepedulian kepada masyarakat dan lingkungan.

Kemampuan Awal, terlihat dengan simbol, bangga sebagai bagian bangsa



Gambar (5)

Konsep operasional CSR Bela Negara dimodifikasi dari Carroll, Archie B. Ann K. Buchholtz (2008) *Business & Society Ethics and Stakeholder Management*, Seventh Edition South-Western Cengage Learning 5191 Natorp Boulevard Mason, OH 45040 USA, p.54

Untuk itu tanggungjawab sosial perusahaan bukan hanya memberi bantuan keuangan semata, namun terkait dengan berbagai kepentingan. Sebuah perusahaan multi nasional bertitik tolak pada misi perusahaan dalam hal ini adalah warga Negara asing, sementara perusahaan beroperasi dalam sebuah Negara yang berdaulat. Untuk itu perlu strategi penyesuaian visi perusahaan asing dengan negara tempatan dengan berbagai persoalannya

¹⁰Halkis, Mhd, (2016) *Gedabu, Termometer Paradigma Berpikir dan Bela Negara*, Universitas Pertahanan, Bogor

4. Diskusi

Banyak peneliti terkait dengan objek maupun subjek penelitian, namun tetap beda tujuan, metode dan teori yang digunakan. Ataur Rahman Belal meneliti CSR negara berkembang dengan mengambil kasus di Bangsalades. Tujuan penelitian Atur mengeksplorasi perkembangan praktik pelaporan CSR di negara berkembang, khusus Bangladesh, sedangkan peneliti mencari model CSR, bukan laporan praktek CSR. Atur menggunakan *Stakeholder theory* bahwa “setiap kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi” (Freeman 1984). Dengan demikian yang diteliti apakah praktik pelaporan CSR saat ini di negara berkembang seperti Bangladesh adalah termotivasi oleh keinginan untuk melepaskan pertanggung jawaban kepada semua pemangku kepentingan terkait atau apakah itu didorong oleh kekhawatiran dengan manajemen strategis yang kuat.¹¹

Kemudian Johnston Stewart meneliti masalah integrasi keuangan perusahaan multinasional dan berhasil merumuskan model model baru dengan mengintegrasikan kantor pusat dengan anak cabang dengan berbasis pengetahuan perusahaan. Strategi yang diterapkan oleh MNC di perusahaan dan tingkat bisnis terkait dengan tugas yang

¹¹Belal, Ataur Rahman (2008) *Corporate Social Responsibility Reporting in Developing Countries The Case of Bangladesh*, Ashgate, Aston Business School, Aston University, UK. p.138

dibutuhkan di anak perusahaan tingkat lokal. Enam strategi subsidi yang berbeda diidentifikasi (kontributor, Pelaksana, distributor, adaptor, inovator dan independen). Masing - masing diusulkan untuk menjadi bagian dari tingkat suatu perusahaan atau Strategi Bisnis (integrasi vertikal, pergerakan geografis pertama, minimisasi biaya, diferensiasi / fokus, inovasi dan diversifikasi portofolio,¹²

Penelitian yang juga mendekati dilakukan Peneliti Rashida dkk. Penelitian ini cukup membantu menjelaskan maksud penelitian ini, sekalipun beda pendekatan karena kuantitatif sedangkan peneliti kualitatif. Rosda melakukan penelitian terhadap perusahaan ritel di Malaysia dengan judul “*Environmental Corporate Social Responsibility (ECSR): Exploring its Influence on Customer Loyalty*” Bertitik tolak pada pemahaman bahwa ECSR adalah sebuah konsep dimana perusahaan mengintegrasikan masalah lingkungan dalam operasi bisnis mereka dan interaksi dengan para pemangku kepentingan, tanpa mengorbankan kinerja ekonomi. Beda dengan peneliti penekanannya yaitu Rosda pada lingkungan (ECSR) sedangkan peneliti menekankan pada sosial. Perbedaan ini cukup serius secara filosofis, karena lingkungan dan masyarakat suatu paradigma

yang berbeda. Metode penelitian Rosda dengan pendekatan kuantitatif, sementara peneliti menggunakan kualitatif. Rosdah dkk. menggunakan populasi untuk penelitian tersebut terdiri dari pelanggan hipermarket utama yang berada di Klang Valley (Kuala Lumpur, Petaling Jaya, Shah Alam dan Subang Jaya).

Saran dari Rosda menarik bagi peneliti, karena dia menyarankan studi selanjutnya, akan menarik untuk mengeksplorasi melampaui industri bisnis ritel dan membandingkannya yang berpotensi berbeda respon sektor usaha lainnya. Pendekatan teori kualitatif dan grounded akan memperkuat dimensi ECSR yang ada, sambil mengeksplorasi dimensi baru dan khas.¹³ Industri Pertambangan merupakan perusahaan yang melampaui bisnis ritel, dan akan digunakan pendekatan kualitatif dan grounded sebagaimana saran Rosdah dkk.

5. Kesimpulan

Strategi pengelolaan *Corporate Social Responsibility*(CSR) antara PT Freeport dengan PT. Chevron terdapat perbedaan, kalau PT. Freeport dalam konteks distribusi ekonomi atau kekayaan sedangkan PT. Chevron dalam konteks pengembangan masyarakat. Proses bantuan dilakukan oleh PT. Freeport terkait dengan karyawan sebagai pelaku dan PT. Chevron dalam melakukan

¹² Stewart, Johnston, (2005) *Headquarters and Subsidiaries in Multinational Corporations Strategies, Tasks and Coordination*, Palgrave Macmillan Houndmills, Basingstoke, Hampshire RG21 6XS and 175 Fifth Avenue, New York, N.Y. 10010, p.173

¹³ Rashida, Nik Ramli Nik Abdul., Shaiful Annuar Khalidb, Nor Irwani Abdul Rahmanc, (2015), *Environmental Corporate Social Responsibility (ECSR): Exploring its Influence on Customer Loyalty*, *Procedia Economics and Finance* 705 – 713

pengembangan masyarakat dilakukan oleh pihak ketiga secara profesional terhadap masyarakat lingkungan sesuai dengan Peraturan Daerah.

Kinerja sosial perusahaan multinasional dalam kategori tanggungjawab sosial pada tingkat *Corporate Citizenship* (CC) dapat dikembangkan menjadi *Corporate Social Responsibility* Bela Negara (CSR-Bela Negara), sedangkan perusahaan multinasional sulit dikembangkan karena masalah nasionalisme dan patriotisme merupakan urusan politik negara. Pemisahan tanggungjawab negara dengan perusahaan terlihat pada perusahaan multinasional yang berorientasi tanggungjawab sosial pada tingkat ekonomi. Untuk itu distribusi ekonomi kepada negara dari hasil eksploitasi perusahaan seolah-oleh lebih terbuka, dengan yang berorientasi pada diskresi bersifat agak tertutup. Realitas perusahaan dalam meletakkan *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai *Corporate Citizenship* (CC) menjadikan suatu perusahaan lebih kuat dalam menghadapi perubahan lingkungan politik yang terjadi.

Daftar Pustaka

Buku dan Jurnal

- Belal, Ataur Rahman, (2008) *Corporate Social Responsibility Reporting in Developing Countries The Case of Bangladesh*, Ashgate, Aston Business School, Aston University, UK
- Brown A., *Organizational Culture*, (Singapore: Prentice Hall, 1998), h.34.
- Cooper Dominic, *Improving Safety Culture: a practical guide*. (London: British Library Cataloguing in Publication Data, 2001). h.7.
- Creswell, John W., *Qualitative Inquiry and Research Design Choosing Among Five Approaches*, (London: SAGE Publications, 2007).
- Carroll, Archie B. Ann K. Buchholtz (2008) *Business & Society Ethics and Stakeholder Management*, Seventh Edition South-Western Cengage Learning 5191 Natorp Boulevard Mason, OH 45040 US
- Cosmides, L. (1997). *Evolutionary psychology*. Paper presented at the Annual Conference of the British Psychological Society, Edinburgh
- David Crowthe, (2007) *Managing Corporate Social Responsibility In Action*, De Montfort University, Leicester, UK
- Deal Terrence E. dan Kennedy Allen A., *Corporate Cultures*, (Addison Wesley Publ. Comp. Inc. 1982), h. 21.
- Dephan RI, *Buku Putih Pertahanan Indonesia*, (Jakarta: Dephan RI, 2008) hh. 128-132.
- Drucker, Peter F. (1999) *Management Challenges for the 21st Century*, Claremont, California New Year's Da, Perfectbound
- Halkis, Mhd, (2016) *Gedabu, Termometer Paradigma Berpikir dan Bela Negara*, Universitas Pertahanan, Bogor
- Kant, Immanuel, (1785, third edition @copyright 1993) *Grounding for the Metaphysics of Moral with On a Supposed Right to Lie Because of Philanthropic Concerns*, (trans. James W. Ellington), Hackett Publishing Company Inc. Indianapolis/Cambridge.

- Matten, Dirk & Andrew Crane dalam *Corporate Citizenship: Towards an extended theoretical conceptualization*, International Centre for Corporate Social Responsibility Nottingham University Business School Nottingham University Jubilee Campus Wollaton Road Nottingham
- Norris, Gweneth, (2005) *Corporate Social Responsibility Case Studies for Management* Accountants University of South Australia
- Smith, Adam, *An Inquiry Into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*, The Wealth of Nations: Book 1 ElecBook Classics
- Marick, Brian, (1999) *New Models for Test Development, Testing Foundations* copyright Reliable Software Technologies. All Rights Reserved
- Boeger, Nina, Rachel Murray, Charlotte Villiers (edt), (2005) *Perspectives on Corporate Social Responsibility*, Edward Elgar Cheltenham, UK • Northampton, MA, USA
- Drucker, Peter F. (1946), *Concept of The Corporation*, Bernington, Vermont
- Whitaker, John K. (edt.). (1996) *The Correspondence of Alfred Marshall, Economist, Alfred Marshall in his garden shelter at Balliol Croft, 1920*. Volume 3. Towards the Close, 1903-1924, Cambridge University Press, New York, Melbourne, Madrid, Cape Town, Singapore
- Drucker, Peter F., (2010) *The Drucker Lectures Essential Lesson Management, Society and Economy*, MC Graw Hill, Toronto, New York
- Peter F. Drucker with Joseph A. Maciariello, (1999) *Management*, Revised Edition, Harper Collin ebook The Drucker Institute Claremont Graduate University Claremont, California
- Pies, Ingo., Peter Koslowski, (edt.), (2011) *Corporate Citizenship and New Governance The Political Role of Corporations, Ethical Economy. Studies in Economic Ethics and Philosophy*, Springer Dordrecht Heidelberg London New York

Perundangan-Undangan

- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007.
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan
- Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Forum tanggungjawab dunia usaha dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- Keputusan Menteri BUMN Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL).